

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Rofiqul Umam. et. al. (ed.). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Para Pakar Hukum*. Bekasi: The Biography Institute, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Edwards, Chris. *Sistem Informasi*. (terj.). Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Humdiana dan Evi Indrayani. *Sistem Informasi Manajemen. Obsesi Mengoptimalkan Informasi dalam Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Jones, Charles O. *Pengantar Publik*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Rahardjo, Budi. *Membangun E-Government*. Bandung: PPAU Mikroelektronika ITB, 2001.
- Neuman. W. L. *Social research methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Mass, 2003
- Lindblom, Charles E., Ardian Syamsudin (penerj.). *Proses Penetapan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: MKRI, KRHN, Yayasan Tifa, 2004.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.

- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya-Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) Bagian Ketiga*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Perkara [Simkara]. Materi Pelatihan Simkara 25-26 Oktober 2008*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Siahaan, Iskandar. *Politik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill. Co, 1984.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sutjipno. *Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam bahasa akademik, bukan politik)*. Jakarta: Konstitusi Press, 2007.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall International, 1981.
- Wibawa Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik, edisi 1 cetakan 1*, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Edgard Elgar Publishing, Ltd, (2001).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 12 Tahun 2008. LN RI Nomor 59 Tahun 2008. TLN RI Nomor 4844
- _____. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 24 Tahun 2003. LN RI Nomor 98 Tahun 2004. TLN RI Nomor 4316
- _____. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 4 Tahun 2004. LN RI Nomor 8 Tahun 2004. TLN RI Nomor 4358

C. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPDD.

_____. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

_____. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

_____. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

D. KEPUTUSAN

Presiden RI, Keputusan. Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Jenderal, Keputusan. Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

_____. Nomor 010.6/KEP/SET.MK/2009 tentang Tim Pengendali Video Conference (Vicon) Pusat dan Tim Pelaksana Sistem Informasi dan Video Conference (Vicon) Daerah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2009 di 34 Fakultas Hukum Indonesia

_____. Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

E. LAMAN

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://www.hukumonline.com>, Terobosan Pengadilan, MK Gagas Pendaftaran Perkara Secara *Online*, 14/8/2006

_____, MK Rancang Penyelesaian Sengketa Pilkada Teleconference, 21 Juni 2008

F. MEDIA CETAK

Kompas, MK akan putus perkara lebih cepat, 28 Mei 2009, 2

Media Indonesia, Penggunaan Video Conference dalam Persidangan Jarak Jauh, 27 Mei 2009, Halaman 2

Seputar Indonesia, Keadilan & Administrasi Peradilan, 11 Mei 2007

Suara Karya, Mahkamah Konstitusi Terdepan Terapkan Peradilan Modern, 19 Desember 2008